

**INSTITUSIONALISASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDIP) DALAM MEMPERKUAT JARINGAN PARTAI POLITIK DI KOTA
MAKASSAR MENGHADAPI PEMILU 2024**



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

ANDI MUHAMMAD RIGAL ALTARIQ G

E041191003

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI
INSTITUSIONALISASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDIP) DALAM MEMPERKUAT JARINGAN POLITIK PARTAI DI KOTA
MAKASSAR MENGHADAPI PEMILU 2024

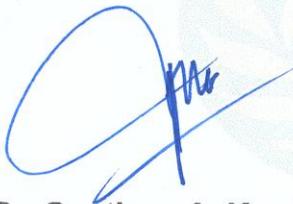
Disusun dan Diajukan Oleh :
A MUH RIGAL ALTARIQ G
E041191003

Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal : Januari 2024

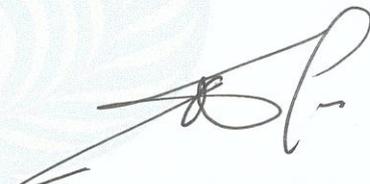
Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.
NIP. 197308131998032001



Haryanto, S.IP., M.A.
NIP. 198610082019031009

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “**INSTITUSIONALISASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DALAM MEMPERKUAT JARINGAN PARTAI POLITIK DI KOTA MAKASSAR MENGHADAPI PEMILU 2024**” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. **Gustina A. Kambo, S.IP., M.Si.** sebagai Pembimbing Utama dan **Haryanto, S.IP, M.A** sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Maret 2024



ANDI MUHAMMAD RIGAL ALTARIQ G
E041191003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur tiada henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, petunjuk, ilmu, pengetahuan, kesempatan, dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan dan junjungan menuju sebaik-baiknya kebaikan. Skripsi ini merupakan bentuk penghargaan penulis sebagai penutup studi pada tingkat Strata 1 disamping bentuk pemenuhan syarat untuk meraih gelar sarjana untuk Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula melalui lembaran ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dari pihak-pihak yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak **Andi Galib Topan** dan Mama **Hj. Marini**. Terima kasih telah melimpahkan kasih sayang, dukungan, perhatian dan do'a yang tiada henti-hentinya kepada Penulis. Segala bentuk kasih sayang, kesabaran, perhatian, hingga pengorbanan Bapak dan Mama untuk membesarkan dan mengantar Penulis hingga sampai di titik ini tidak akan mampu terbalaskan oleh Penulis. Oleh karena itu semoga Allah yang akan membalasnya dengan perlindungan dan limpahan rahmat-Nya kepada Bapak dan Mama. Dengan berakhirnya masa studi S1 Penulis, semoga Penulis dapat membawa kebahagiaan yang lebih besar untuk Bapak dan Mama di masa yang akan datang. InsyaAllah, Amin.
2. Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sebagai tempat yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I penulis, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP.**, dan pembimbing II penulis yaitu Bapak **Haryanto, S.IP., M.A.**, yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan sangat berjasa dalam membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, berkat arahan dari kedua dosen pembimbing, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Insya Allah kebaikan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT.
5. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**, Alm. Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Haryanto, S.IP., M.A.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, terkait pengurusan berkas dan administrasi. Semoga segala pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dan akan dilakukan bernilai pahala, dan semoga senantiasa diberikan kemudahan.

7. Keluarga Penulis, mulai dari adik pertama penulis yaitu **Andi Muhammad Rihad** dan adik kedua penulis yaitu **Andi Muhammad Rifky Alghifary Galib**. Semoga segala urusan adik-adik baik dalam pekerjaan dan studi selalu dimudahkan oleh Allah SWT.
8. Seluruh teman-teman angkatan **Ilmu Politik Angkatan 2019**. Terima kasih telah menjadi teman-teman diskusi Penulis dan sudah membantu dalam hal akademik dan non-akademik lainnya.
9. Special thank you untuk **Andi Nurfadhilah Amanda Tanra** karena telah menemani penulis dalam setiap proses, hingga skripsi ini dapat tertulis dengan baik. Penulis sangat mengapresiasi semua bentuk dukungan yang diberikan. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih, Te Amo.

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD RIGAL ALTARIQ GALIB. Institusionalisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Memperkuat Jaringan Partai Politik di Kota Makassar Menghadapi Pemilu 2024 (dibimbing oleh Gustiana Kambo dan Haryanto).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana institusionalisasi PDIP melalui dimensi systemness dalam memperkuat jaringan partai politik di Kota Makassar menghadapi pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, situs internet resmi, serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa institusionalisasi PDIP melalui dimensi systemness dalam memperkuat Jaringan Partai Politik di Kota Makassar Menghadapi Pemilu 2024 dilakukan dengan beberapa upaya yaitu dengan memperkuat atau menyempurnakan struktural partai ke seluruh elemen dan tingkat masyarakat; melakukan edukasi politik ke masyarakat; penyesuaian kebutuhan dan aspirasi masyarakat berdasarkan konteks kebutuhan masyarakat setempat.

Kata kunci: Institusionalisasi, PDIP, Jaringan Sosial, Systemness, Partai Politik

ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD RIGAL ALTARIQ GALIB. **Institutionalization of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) in Strengthening Political Party Networks in Makassar City Facing the 2024 Election** (supervised by Gustiana Kambo dan Haryanto).

This study aims to determine how the institutionalization of PDIP through the systemness dimension in strengthening the network of political parties in Makassar City facing the 2024 elections. The research method used in the preparation of this thesis is a descriptive method, with data collection techniques in the form of literature reviews sourced from books, journals, articles, official internet sites, and reports related to this research.

The results of this study show that the institutionalization of PDIP through the systemness dimension in strengthening the Political Party Network in Makassar City Facing the 2024 Elections is carried out with several efforts, namely by strengthening or perfecting the party's structure to all elements and levels of society; conducting political education to the public; Adjustment of community needs and aspirations based on the context of local community needs.

Keywords: Institutionalization, PDIP, Social Network, Systemness, Political Party

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Institusionalisasi Partai.....	13
2.2 Jaringan Partai Politik.....	18
2.3 Kerangka Berpikir.....	22
2.4 Penelitian Terdahulu.....	23
2.5 Skema Pemikiran.....	25
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Lokasi Penelitian.....	26
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian.....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4 Informan Penelitian.....	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV.....	30
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Makassar.....	30

BAB V	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45

5.1	Institusionalisasi PDIP melalui Dimensi kesisteman dalam Memperkuat Jaringan Politik di Kota Makassar pada Pemilu 2024	45
BAB VI	57
PENUTUP	57
6.1	Kesimpulan.....	57
6.2.	Saran	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai¹. Sigmund Neumann dalam karangannya mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda².

Hal tersebut juga selaras dengan pandangan Mark. N. Hagopian, bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam

¹ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1996), hal. xv

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 162

pemilihan. Berdasarkan pandangan tersebut, tampak jelas bahwa basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan³. Basis ideologi dan kepentingan tersebut terbentuk dalam sebuah institusionalisasi partai politik yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi partai politik tersebut. Hal ini disebabkan oleh esensi partai politik sebagai pilar yang sangat penting dan perlu untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis⁴.

Esensi partai politik pun juga dapat diamati di berbagai negara di dunia yang menerapkan sistem demokrasi, salah satunya adalah Indonesia. Pergerakan partai di Indonesia sebagian besar hanya terlihat dimusim pemilu semata, sehingga hal ini dapat diidentifikasi sebagai bentuk kelemahan-kelemahan dari partai yang hanya hadir disaat pemilu saja. Fenomena tersebut tentu saja menandakan bahwa perlunya mendorong pengoptimalan institusionalisasi atau pelembagaan partai baik dalam tubuh maupun dari luar partai, agar partai senantiasa hadir dan melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Perlunya institusionalisasi partai tidak hanya berlaku untuk partai lama semata,

³ Ichlasul Amal, op. cit., hal. xv

⁴ Budi Prayitno, "Pelembagaan Politik PDIP Jateng", diakses 15 Maret 2023, hal. 26. <http://eprints.undip.ac.id/24270/>

namun juga perlu dilakukan oleh partai baru dalam memeperhatikan institusionalisasi partainya walaupun hal tersebut hanya berada pada taraf dasar.

Di Indonesia terdapat beberapa partai yang eksistensinya telah berskala nasional, dimana salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang cukup lama hadir dalam perpolitikan Indonesia. PDIP merupakan partai pemenang pemilu 2019. Pemilihan presiden yang dimenangkan dengan pencalonan pasangan Jokowi dan Ma'ruf amin serta mendapatkan 128 kursi di DPR memperlihatkan bahwa partai ini mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat luas. Selain itu, PDIP juga merupakan partai yang senantiasa menjaga citra publik untuk menjaga dukungan dan jaringan yang sudah ada. Selain kader partai terbanyak yang menduduki pemerintah, kader PDIP selalu muncul di permukaan seperti media massa sehingga masyarakat sering melihat bagaimana petugas pemerintah sekaligus kader partai PDIP menunjukkan dirinya.

Eksistensi PDIP pun telah mencakup seluruh elemen masyarakat yang dapat diamati dari berada dalam skala kota/daerah seperti PDIP Kota Makassar telah mulai berupaya dalam institusionalisasi partainya seperti membentuk struktur partai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRT), adapun upayanya masih pada

taraf memperluas jaringan politiknya karena memperluas jaringan politik berarti berupaya memperkuat kesisteman partai dalam institusionalisasi partai.

Dalam proses institusionalisasi partai terdapat beberapa dimensi, salah satunya adalah dimensi *systemness* yaitu pendekatan dimensi yang berfokus pada pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, yang dilakukan berdasarkan aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam partai politik tersebut. Dimensi ini menjadi hal yang penting terlebih lagi dalam menghadapi pemilu sebab pengetahuan masyarakat yang terbagun dari suatu partai politik akan sangat memengaruhi keberlangsungan partai politik.

Kota Makassar merupakan salah satu daerah penting khususnya Indonesia wilayah timur. Hasil pemilu 2019 memberikan hasil bahwa Partai Nasdem keluar sebagai partai pemenang di Kota Makassar. PDIP melihat ini sebagai semangat untuk menempatkan partai di posisi yang baik di Kota Makassar khususnya citranya. Untuk menyamakan usaha yang dilakukan di pusat dan di Kota Makassar, beberapa kali kunjungan dilakukan oleh beberapa tokoh nasional sekaligus kader partai PDIP. Terbaru ini adalah kunjungan Ganjar Pranowo yaitu calon presiden dari PDIP. Pada safari politiknya, Ganjar menyebutkan bahwa Makassar menjadi daerah pertama yang dikunjungi setelah pengumuman calon presiden dari PDIP. Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat beberapa usaha yang dilakukan sebagai persiapan menghadapi pemilu 2024.

Terdapat beberapa aktifitas institusionalisasi partai yang dilakukan oleh PDIP yaitu dengan memeriahkan beberapa kegiatan PDIP nasional. Hal ini terlihat pada PDIP Sulsel yang mendelegasikan 300 kader partainya untuk memeriahkan HUT PDIP di Jakarta. Dengan adanya partisipasi PDIP Sulsel tersebut tentu menunjukkan bahwa hubungan PDIP pusat dan Sulsel terjalin dengan baik dan bersifat timbal balik, salah satunya adalah dalam upayanya untuk menghadapi pemilu 2024. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidajat pun terjun langsung ke Makassar untuk membakar semangat kader-kader PDIP dalam pelatihan saksi, kaderisasi dan pelatihan.

Rangkaian hubungan timbal balik tersebut menentukan target pada pemilu 2024 mendatang dengan menargetkan 5 kursi DPR RI dan 12 kursi DPRD Sulsel. Ditambah lagi Ketua DPD Andi Ridwan Wittiri mendorong untuk membangun beberapa kantor partai di tingkat DPC Kabupaten/Kota agar lebih siap lagi menghadapi pemilu 2024. Selain kegiatan internal partai dan target pemilu 2024, PDIP Sulsel juga sering mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, salah satu kegiatan tersebut adalah Budidaya Tanaman Pisang bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Hotel Claro Makassar. Ketua PDIP Sulsel pun mengajak mahasiswa dan ibu-ibu untuk membudidayakan

tanaman pisang.

Pengurus tim pemenangan PDIP untuk pemilu di Kota Makassar menjelaskan bahwa secara kelembagaan PDIP terbilang cukup matang yang ditandai dengan terstruktur dan berkesinambungannya pengurus partai mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat nasional, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kab/kota, Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan, Pengurus Ranting di tingkat kelurahan, Anak Ranting di tingkat RT/RW, dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN).

Salah satu proses institusionalisasi PDIP adalah perekrutan kader. Proses kaderisasi merupakan pondasi untuk mempersiapkan kader-kader PDIP untuk menjalankan nawacita serta kontestasi politik yang ada. Proses kaderisasi kader PDIP sudah tertuang dan diatur di AD/ART PDIP yaitu dengan tahapan pendidikan kader pratama di tingkat DPC atau kab/kota. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kader madya di tingkat DPD atau provinsi. Lalu pendidikan kader utama di tingkat DPP atau nasional. Kader-kader partai diklasifikasikan ke dalam beberapa badan yang dimiliki oleh PDIP. Beberapa diantaranya adalah Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) yang mengurus strategi pemenangan kontestasi politik di pemilu, Badan Kebudayaan Nasional (BKN) yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan budaya serta politik, Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) yang

mengurusi dan membantu mendorong ekonomi masyarakat, dan Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) yang mengurusi dan membantu masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.

Selain itu, PDIP juga memiliki sayap untuk menyentuh beberapa segmen masyarakat. Beberapa diantaranya adalah Banteng Muda Indonesia (BMI) untuk segmen pemuda, Taruna Merah Putih (TMP) untuk segmen pelajar, Baitul Muslimin (BAMUSI) untuk segmen muslimin, dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) untuk segmen aktivis dan buruh. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan oleh Taruna Merah Putih adalah diadakannya kegiatan *try out* atau bimbingan belajar kepada siswa SMA untuk persiapan ujian masuk PTN. Usaha inilah yang dinilai menjadi cara PDIP untuk memperlihatkan citra publik yang baik hingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam urusan pembiayaan, PDIP menganut asas gotong royong. Sehingga ketika ada kegiatan yang akan dilakukan maka partai memberikan intruksi kepada kader dan petugas partai legislatif untuk sama- sama bergotong royong menyelesaikan permasalahan dana. Hal ini menekankan bahwa sumber dana PDIP tidak bergantung pada beberapa tokoh partai saja tapi menganut gotong royong untuk menyelesaikan *problem* yang ada.

Di Kota Makassar terdapat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tugas DPC adalah selain mengurus struktural di bawahnya yaitu PAC di

tingkat kecamatan, pengurus ranting di tingkat kelurahan, dan anak ranting di tingkat RT/RW, DPC PDIP Kota Makassar juga harus dapat menyentuh dan melakukan komunikasi dengan masyarakat kota makassar serta melakukan pemetaan politik di seluruh daerah Kota Makassar. Salah satu contoh di kecamatan Rappocini, PDIP melakukan perekrutan kader yang merupakan tokoh di kecamatan tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu usaha dari DPC PDIP Kota Makassar untuk memperkuat institusi kepartaiannya. Kemudian contoh lain dari tugas DPC PDIP Kota Makassar adalah menjaga garis komunikasi dengan struktural di bawahnya. Sehingga ketika ada kebijakan atau intruksi yang dikeluarkan oleh DPP maka kebijakan atau intruksi tersebut dapat didistribusikan dengan baik hingga tingkat ranting di RT/RW.

Sehubungan dengan hal tersebut, PDIP memiliki julukan sebagai partai wong cilik atau partai yang dekat dengan masyarakat sehingga PDIP perlu memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Termasuk pada saat masa covid-19 DPC PDIP Kota Makassar turut membantu pemerintah dengan rutin membagikan sembako kepada masyarakat Kota Makassar yang dinilai membutuhkan. Hal tersebut juga menjadi implementasi dari intruksi yang diberikan oleh ketua umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Ketua

umum PDIP mengintruksikan bahwa semua kader partai harus turun ke bawah mendengarkan keluh kesah masyarakat serta berusaha membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menjadi usaha PDIP khususnya di Kota Makassar untuk membangun jaringan politiknya melalui dimensi kesisteman untuk mempersiapkan kontestasi di pemilu 2024.

Hal ini juga tidak luput dari upaya pengambilan keputusan PDIP yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Proses pengambilan keputusan dimulai dari penerimaan aspirasi dari struktural daerah kemudian aspirasi tersebut diusulkan ke DPP. Keputusan akan ditentukan oleh DPP dan semua struktural di bawahnya patuh dan menerima keputusan tersebut. Tentu pengambilan keputusan oleh DPP mempertimbangkan banyak hal. Selain itu, PDIP juga terkenal sebagai partai yang sering melakukan rapat dimana terhitung pada DPC Kota Makassar terhitung sudah melakukan rapat pleno sebanyak 66 kali di luar rapat kerja cabang, rapat kerja cabang khusus, dan rapat koordinasi.

Salah satu hasil dari rapat yang dilakukan oleh PDIP adalah usulan kebijakan yang kemudian disampaikan kepada fraksi- fraksi PDIP yang duduk di DPRD dan DPR. Melalui struktural partai yang menyentuh hingga akar rumput, PDIP berkomitmen untuk selalu mendengarkan usulan atau keluh kesah yang disampaikan oleh masyarakat yang kemudian dirapatkan dan menjadi usulan untuk

membuat kebijakan melalui perpanjangan tangan fraksi-fraksi PDIP. Sehingga PDIP secara aktif terlibat dalam proses legislatif.

Permasalahan dan penelitian mengenai institusionalisasi partai telah dibahas dalam penelitian terdahulu. Sebagaimana dalam penelitian Haqiqi⁵ yang mengkaji tentang lembaga Partai NasDem, yang berasumsi bahwa dalam melakukan institusionalisasi lembaga Partai NasDem telah menggunakan konsolidasi politik yang terbagi menjadi tiga tahapan. Pertama, konsolidasi institusionalisasi untuk pembentukan partai, penyusunan kepengurusan, dan perekrutan kader. Kedua, konsolidasi institusionalisasi untuk persiapan Pemilu Legislatif. Ketiga, konsolidasi institusionalisasi untuk melakukan evaluasi setelah Pemilu Legislatif.

Selain itu, dalam penelitian Prayitno⁶ yang memfokuskan penelitiannya di PDIP Jateng, institusionalisasi politik PDIP Jateng tergolong masih dalam derajat institusionalisasi yang rendah. Kondisi tersebut terjadi akibat dominannya porsi yang diambil DPP PDIP dalam menentukan segala keputusan politik di daerah. DPD PDIP Jateng sebagai kepanjangan tangan partai di daerah hanya diperankan sebagai

⁵ Panca Haqiqi. 2014. Pelembagaan Partai NasDem (Studi Kasus Pelembagaan DPD Partai NasDem Kota Surabaya dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Muda*, Vol 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm. 422

⁶ Budi Prayitno. 2009. Pelembagaan Politik PDIP Jateng. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm.3

objek penderita dari keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian Eristyawan, disebutkan bahwa institusionalisasi partai yang rendah menjadi penyebab utama kemerosotan suara tersebut PKB pada tahun itu. Rendahnya institusionalisasi PKB salah satunya dapat dilihat dari fraksi-fraksi yang terjadi antar faksi-faksi yang ada di internal PKB. Fraksi-fraksi yang terjadi menunjukkan kurang kuatnya dimensi kesisteman atau *systemness* dalam tubuh PKB. Rendahnya dimensi kesisteman tersebutlah yang akhirnya menimbulkan perpecahan di internal PKB dan menjadi penyebab utama kemerosotan suara PKB pada pemilu tahun 2009⁷.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut jelas bahwa institusionalisasi didalam suatu partai politik masih dipertanyakan dan sangat mempengaruhi pada perolehan suara ketika pemilihan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis apakah partai politik besar dan berkelas seperti PDIP sudah mampu melembagakan partainya melalui dimensi kesisteman atau *systemness* dalam memperkuat jaringan sosialnya di masyarakat. Berdasarkan masalah pokok di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai institusionalisasi

⁷ Fajar Novi Eristyawan. 2014. Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemerosotan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur. Jurnal Politik Muda, vol. 3 No. 2, hlm. 50

yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menghadapi pemilihan anggota legislatif periode 2024-2029 di Kota Makassar. Oleh karena itu, penulis meneliti dengan judul “Institusionalisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Memperkuat Jaringan Politik Partai di Kota Makassar Menghadapi Pemilu 2024”

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diambil penulis adalah “Bagaimana Institusionalisasi PDIP Melalui Dimensi *Systemness* dalam Memperkuat Jaringan Partai Politik di Kota Makassar Menghadapi Pemilu 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan maka didapatkan sebagai berikut:

Untuk mengidentifikasi bagaimana institusionalisasi PDIP melalui dimensi *systemness* dalam memperkuat jaringan partai politik di Kota Makassar menghadapi Pemilu 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Institusionalisasi Partai

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Kata polis kemudian diturunkan menjadi polities yang berarti warga negara. Pada perkembangannya politik kemudian menjadi sebuah ilmu atau politike epitesme. Penerapan ilmu politik menjadikan pelaku politik memiliki politike tekne' atau kemahiran politik. Politik merupakan sebuah cara atau pendekatan yang dilakukan para pelakunya untuk menuju atau mencapai sebuah tujuan. Beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama kemudian membentuk sebuah wadah yang sekarang dikenal sebagai partai politik. Beberapa ahli menyampaikan definisi masing-masing mengenai partai politik seran peran dan fungsinya.

Menurut Carl J. Friedrich partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil serta materiil. Secara lanjut Carl J. Friedrich menyebutkan fungsi partai di negara demokrasi merupakan sarana komunikasi politik. Terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang menyebabkan terciptanya masyarakat

yang kompleks dengan aspirasi yang variatif, akan sangat mudah dilupakan aspirasi tersebut jika tidak ditampung atau tidak dikombinasikan dengan aspirasi orang lain yang seirama. Penyatuan ini disebut dengan *interest aggregation*. Kemudian dirumuskan kembali atau *interest articulation*.

Sigmund Neumann juga menyebutkan bahwa partai politik merupakan wadah perantara untuk menyambungkan banyak kekuatan serta ideologi sosial dengan lembaga pemerintah dengan aksi politik tertentu yang kemudianditerapkan pada masyarakat dengan skala yang lebih luas. Secara detail persyaratan pendirian, tupoksi, dan institusi partai di Indonesia telah diatur pada konstitusi pada undang-undang no 2 tahun 2011.

Giovani Sartori menyebutkan salah satu bentuk aksi politik partai politik adalah dengan ikut serta pada pemilihan umum dan menempatkan calon- calonnya untuk menduduki jabatan publik. Keikutsertaan pada pemilu merupakan langkah taktis untuk memiliki kekuatan yang lebih besar lagi untuk memenuhi peran partai politik sebagai penyambung aspirasi sosial masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

Institusionalisasi partai politik adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku, maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the*

process by which the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture).

Institusionalisasi ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu; pertama, dimensi kesisteman suatu partai (*systemness*) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. Kedua, dimensi identitas nilai suatu partai (*value infusion*) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. Ketiga, dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal-struktural. Keempat, dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal-kultural (Randal and Svasand, 2002).

1. Dimensi kesisteman, *systemness* memiliki arti sebagai proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam partai politik.
2. Dimensi identitas nilai, *value infusion* partai politik merupakan nilai yang didasarkan pada ideologi atau platform partai. Nilai inilah yang menjadi basis kesatuan bagi para anggota dan supporter untuk mendukung partai tersebut karena *value infusion* adalah representasi dari pola dan arah perjuangan partai politik.

3. Dimensi *decisional* autonomy, independensi partai politik akan ditentukan oleh kemampuan partai untuk membuat keputusan secara otonom. Rendahnya nilai *decisional* autonomy menunjukkan bahwa pembuatan keputusan di dalam partai merupakan transaksi kepentingan antara elite partai dengan kepentingan aktor lain yang berada di luar partai.
4. Dimensi yang terakhir atau citra publik, *reification* merupakan kedalaman pengetahuan publik atas keberadaan partai politik tersebut. Penilaian terhadap proses institusionalisasi partai politik di Indonesia masih begitu rendah. Hal ini diukur dari empat dimensi yakni dimensi *systemness*, *value infusion*, *decisional* *autonomy* dan *reification*.

Dari dimensi *systemness*, partai politik di Indonesia masih belum memiliki kesatuan yang erat di dalam tubuh internal partai. Sedangkan dari dimensi *value infusion*, partai politik masih belum mampu menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi ciri partai yang dapat membawa manfaat jangka panjang. Sebagian besar partai di Indonesia masih terfokus untuk mendapatkan popularitas dan keberhasilan secara instan, sehingga pengabaian pada penumbuhan ideologi dan platform jangka panjang membuat partai tersebut menjual pragmatisme sebagai produk politik kepada masyarakat. Dari dimensi *decisional* *autonomy*, pembuatan keputusan partai politik biasanya sarat dengan

hasil negosiasi lingkaran elite politik di level pusat dan bukan ditentukan oleh suara dan kepentingan para pendukungnya. Dan yang terakhir, dari dimensi reification, partai politik baru mampu menanamkan citra partainya kepada masyarakat melalui serangkaian simbol-simbol kepartaian saja misalnya warna atau gambar partai, bukan pada visi misi yang dibawa oleh partai tersebut (Angulo, 2010).

Keberadaan institusionalisasi partai politik begitu penting dalam konteks kenegaraan, hal ini disebabkan karena partai politik berperan sebagai komponen pendukung bagi terwujudnya sistem demokrasi yang sehat. Rendahnya institusionalisasi menyebabkan timpangnya sistem perpolitikan Indonesia yang kekuasaannya tidak berputar di sekeliling masyarakatnya melainkan ke segelintir elite politik. Secara mikro, gambaran sistem kepartaian di Indonesia diwarnai dengan begitu dominannya peran pemimpin politik dalam menentukan keberhasilan partai di arena politik negara. Hal ini dikarenakan partai politik tidak berbasis pada *grassroots* sehingga masyarakat hanya diposisikan sebagai individu yang nilai gunanya ditentukan dari suara yang mereka berikan dalam pemilihan (Angulo, 2012).

Dalam posisi dan peran seperti itu, partai bukannya bertindak sebagai corong aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi justru menggunakan rakyat sebagai alat dalam memperjuangkan nilai dan kepentingan pribadi partai. Singkatnya, partai menjadikan rakyat

sebagai sumber daya pasif untuk membangun kekuatan partai dalam kompetisi politik. Keberlanjutan partai politik di Indonesia pun hanya mengandalkan pada kharisma atau pamor si pemimpin dalam meraih massa. Kepemimpinan merupakan pokok yang sangat penting di dalam partai, namun mendasarkan keberlanjutan hidup partai pada tokoh tunggal si pemimpin saja, secara kontraproduktif melemahkan kapabilitas partai politik tersebut secara internal. Partai politik seharusnya melakukan kaderisasi pada pemimpin-pemimpin yang muda. Upaya ini dapat dilihat sebagai representasi kesungguhan partai dalam membangun pemimpin sehingga pada nantinya partai tersebut mampu menciptakan produk pemimpin yang baik. Proses melahirkan kepemimpinan seperti ini tentunya akan menghentikan fenomena munculnya aktor politik dadakan demi meningkatkan popularitas dan voting level partai.

2.2 Jaringan Partai Politik

Jaringan partai politik adalah istilah yang mengacu pada jaringan atau hubungan yang terbentuk antara partai politik, anggota partai, dan kelompok kepentingan dalam suatu sistem politik. Dasar teori jaringan partai politik mencakup beberapa pendekatan (Cholisin, 2007), seperti:

1. Pendekatan Institusional

Pendekatan ini fokus pada analisis struktur dan karakteristik partai politik sebagai sebuah institusi politik. Teori ini

memperhatikan bagaimana partai politik terbentuk, beroperasi, dan mempengaruhi keputusan politik dalam suatu sistem politik.

2. Pendekatan Rasionalitas

Pendekatan ini fokus pada analisis tindakan individu dan kelompok kepentingan dalam partai politik. Teori ini melihat partai politik sebagai kumpulan aktor yang berusaha memaksimalkan kepentingan mereka, dan saling bersaing untuk mempengaruhi keputusan politik.

3. Pendekatan Jaringan Sosial

Pendekatan ini fokus pada analisis struktur dan karakteristik jaringan partai politik. Teori ini melihat partai politik sebagai jaringan interaksi sosial yang kompleks, di mana aktor politik terhubung melalui berbagai jenis hubungan dan memiliki akses ke sumber daya yang berbeda.

Terdapat beberapa model dalam memaknai jaringan sosial yaitu model *structuralist*, yaitu menjelaskan variasi kesuksesan sebagai sebuah fungsi dari ikatan-ikatan sosial yang terbentuk; adapun model *connectionist* melihat kerangka difusi atau pengaruh sosial yang mencoba menjelaskan masalah homogenitas dalam sikap aktor, keyakinan dan prakteknya. Dari model *structuralist*, terdapat beberapa bentuk hubungan yaitu sebagai berikut

- a. Hubungan sosial sebagai modal struktural, dimana aktor dilihat sebagai agen yang aktif, rasional yang mengeksploitasi kedudukannya dalam jaringan agar dapat memaksimalkan keuntungan.
- b. Hubungan sosial sebagai akses sumber daya, dimana kesuksesan seorang aktor adalah sebuah fungsi dari kualitas dan kuantitas sumberdaya yang dikontrol oleh alter-alter si aktor. Singkatnya, dilihat secara implisit sebagai agen yang aktif, rasional dan yang berpengaruh, membentuk, dan mengeksploitasi ikatan-ikatan sosial untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Adapun terdapat beberapa bentuk hubungan dari model *connectionist*, yaitu sebagai berikut

- a. Hubungan sosial sebagai *contagion* (penularan), dimana hubungan tersebut menjelaskan sikap, budaya, dan praktek bersama terbentuk melalui proses interaksi. Penyebaran tersebut ditiru sebagai sebuah fungsi dari transmisi interpersonal sepanjang ikatan-ikatan tersebut berpengaruh (*influence flow*). Singkatnya, terjadi suatu kesatuan sosial dimana para aktor saling mempengaruhi dan menginformasikan satu sama lain dalam sebuah proses sehingga menciptakan

suatu homogenitas dalam suatu sub-jaringan tertentu.

- b. Hubungan sosial sebagai pembentuk lingkaran sosial, dimana penyebaran terbentuk dari proses interaksi dalam sebuah jaringan sosial, melalui ikatan-ikatan *multinetwork* sehingga menghasilkan suatu jaringan sosial yang serupa. Singkatnya, hubungan ini memiliki perpanjangan dari hubungan sebelumnya dimana hubungan ini dapat dimaknai sebagai hasil dari proses *contagion* (penularan) sebelumnya.

Dalam praktiknya, dasar teori jaringan partai politik dapat digunakan untuk menganalisis hubungan kekuasaan dan pengaruh antara partai politik dan kelompok kepentingan, serta untuk memahami bagaimana partai politik mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan dalam suatu sistem politik. Analisis jaringan partai politik juga dapat membantu dalam memahami perubahan dan dinamika dalam sistem politik, seperti krisis politik atau perubahan dalam dukungan elektoral.

Berdasarkan uraian di atas maka jaringan partai politik dapat disimpulkan sebagai pengejawantahan pengendalian elemen dari institusionalisasi partai yang terdiri dari sistem, lembaga, dan sumber daya partai yang kemudian dihubungkan dengan lembaga lainnya, elite, dan konstituen atau pemilih. Oleh karena itu kedudukan jaringan partai politik menjadi cukup vital dalam proses dinamika politik khususnya

pada keikutsertaan partai politik pada pemilihan umum.

2.3 Kerangka Berpikir

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Makassar lahir dan berkembang sebagai partai politik tidak terlepas dari peran elit-elit partai tersebut dalam mengupayakan terbangunnya komunikasi yang baik antar pengurus yang berada didalam struktural partai. PDIP dalam pemilihan di legislatif pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang sangat baik dimana PDIP ini merupakan peraih kursi terbanyak diantara partai-partai besar pesaingnya yang bertarung pada saat itu seperti partai Demokrat, Golkar, dan Nasdem.

Hasil tersebut tidak terlepas dari bagaimana peran dari elit partai tersebut dalam melakukan institusionalisasi terhadap internal partai, hal ini ditunjukkan dari bagaimana upaya rekrutmen politik yang begitu serius dilakukan oleh partai dalam upaya menciptakan stabilitas ditubuh partai serta manajemen partai juga sebagai salah satu bagian penting dalam mengusung gerakan partai terutama mengorganisir orang-orang yang berada dalam struktural partai.

Pemilu selalu menjadi pesta politik khususnya di Indonesia. Dampak yang akan terasa pada sektor lain selain politik juga menambah kesan penting keberlangsungan pemilu. Tahun 2024 akan menjadi tahun politik selain pemilihan pejabat daerah juga akan berlangsung pemilihan presiden. Posisi partai politik dalam proses tersebut perlu

diperhatikan. Semua partai politik termasuk PDIP tentu akan melakukan persiapan dalam menyambut pemilu 2024. Pemilihan strategi politik yang tepat berasal dari kondisi internal partai yang baik. Oleh karena itu instistuisionalisasi merupakan komponen yang sangat penting partai politik dalam menyongsong pemilu 2024.

2.4 **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham Prawansyah yang telah melakukan penelitian mengenai "Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang Konsolidasi Internal DPD II Golkar Makassar Menjelang Pilwalkot 2013)" dengan memakai Metode penelitian kualitatif dengan paradigam fenomenologi dan mendapatkan data dari wawancara, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perlawanan dari beberapa kader muda terhadap keputusan DPP Partai Golkar dalam rekomendasi dukungan dikarenakan penetapan pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid pada Pilwalkot Makassar tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. DPP mengindahkan hasil dari konsolidasi yang telah lama dibangun kader di tingkat pengurus lokal untuk mengutamakan calon yang dapat diterima di masyarakat Makassar dan juga di internal Golkar Makassar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahmat Hidayat tentang "Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang Rekomendasi

Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013) dengan memakai Metode deskriptif kualitatif dan mendapatkan data dari wawancara, menyimpulkan bahwa proses institusionalisasi DPWPAN mengenai kemampuan organisasional partai dalam menyikapi sebuah keputusan masih diwarnai dengan beberapa perbedaan pendapat. Tentunya secara prinsip kelembagaan, hal ini dapat berefek buruk terhadap kedaulatan institusi partai jika tidak mampu dikelola secara baik. Namun sebaliknya, ketika partai memiliki kemampuan manajemen konflik yang baik serta penerapan aturan secara maksimal dalam pola dan sikap partai, maka partai politik dapat terinstitusionalisasi secara optimal di tengah masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titin Purwaningsih tentang "Analisis Institusionalisasi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung) dengan memakai Metode penelitian kualitatif dan mendapatkan data dari wawancara, menyimpulkan bahwa: Pertama, tingkat Institusionalisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung, berada dalam kategori sedang dengan nilai(1,19). Kedua, kestabilan perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung tidak sematamata dipengaruhi oleh institusionalisasi partai, tetapi dipengaruhi oleh dua faktor lain yang lebih dominan yaitu: praktek patronase dan klientelisme

dalam pilgub dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan, hal itu dikarenakan tim sukses atau relawan dalam pilgub yang berasal dari luar Partai Demokrat secara tidak langsung turut serta mengkampanyekan Partai Demokrat dalam pileg, serta praktek patronase dan kientelisme yang dilakukan oleh caleg Partai Demokrat pada saat pemilihan legislatif.

2.5 Skema Pemikiran

